

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri. (2021). Diambil kembali dari Bapenda Kepri: dispenda.kepriprov.go.id
- Badan Pusat Statistika. (2021). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2017-2019*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>
- Fitriani, A., & Rosdiana, W. (2018). *Efektifitas program pemberian keringanan*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hurummaqsuroh, A. (2018). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderating (Studi kasus WPKB yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ilham, O. N. (2020). *Analisis Efektivitas Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Tengah*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Indonesia, P., & Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Listantriningsih. (2020). *Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*

Terhadap Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Tangerang Selatan : PKN STAN.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Maulida, R. (2018). *Pemutihan pajak kendaraan, ini informasinya lengkapnya.*

Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak/pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2012). Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2018). Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2021). Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua.

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 142-155.

Siregar, D. N. (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*. Universitas Muhammadiyah.

Sucahyowati, H. (2017). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Malang: Wilis.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Syafa'ati, A. (2021). *Tinjauan Efektivitas Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di
Tangerang Selatan: PKN STAN.*

Wardani, R., & Fadhli, W. (2017). Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap
pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 10-17.